



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**SOSIALISASI KEBIJAKAN  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
DAN  
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN 2021**

# DAFTAR ISI

**01**

**Kebijakan  
Bantuan Operasional Sekolah 2021**

**02**

**Kebijakan  
Dana Alokasi Khusus Fisik 2021**



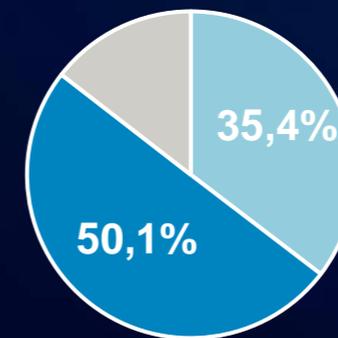
## Kebijakan BOS pada tahun 2020 untuk menyalurkan langsung ke rekening sekolah berhasil mengurangi keterlambatan dan mendapatkan tanggapan positif

Penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah di tahun 2020 **mengurangi keterlambatan**

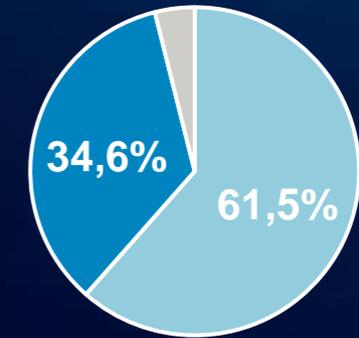
rata-rata **32%**

atau sekitar **tiga minggu lebih cepat** dibandingkan tahun 2019

**Responden sekolah**



**Responden pemerintah daerah**



■ Sangat memudahkan ■ Memudahkan

Dalam survei Kemendikbud, **85,5%** responden sekolah dan **96,1%** responden pemerintah daerah memandang penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah memudahkan atau sangat memudahkan



**Pada tahun 2021, Pemerintah menyediakan BOS kepada 216.662 satuan pendidikan dengan alokasi sebesar Rp52,5T**

<b>Subbidang</b>	<b>Sasaran Satuan pendidikan</b>	<b>Alokasi</b>
<b>SD</b>	<b>147.610</b>	<b>Rp 23.801.844.160.000</b>
<b>SMP</b>	<b>39.461</b>	<b>Rp 11.649.105.310.000</b>
<b>SMA</b>	<b>13.374</b>	<b>Rp 7.758.155.310.000</b>
<b>SMK</b>	<b>14.000</b>	<b>Rp 8.649.938.250.000</b>
<b>SLB</b>	<b>2.217</b>	<b>Rp 645.926.260.000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>216.662</b>	<b>Rp 52.504.969.290.000</b>

*Catatan:  
Dana cadangan sebesar Rp100.048.710.000*



# Pokok-Pokok Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2021

*sesuai Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler*

01



**Nilai satuan biaya Bantuan Operasional Sekolah bervariasi** sesuai karakteristik daerah

02



**Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah tetap fleksibel**, termasuk untuk keperluan persiapan pembelajaran tatap muka

03



**Pelaporan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah dilakukan secara daring**

# 01 Nilai satuan biaya Bantuan Operasional Sekolah bervariasi sesuai perbedaan karakteristik dan kebutuhan antar daerah

## Kebijakan BOS tahun 2020

Satuan biaya yang sama berlaku untuk semua wilayah

Nilai satuan biaya per peserta didik per tahun:

SD	900.000
SMP	1.100.000
SMA	1.500.000
SMK	1.600.000
SLB	3.500.000

## Kebijakan BOS tahun 2021

Satuan biaya berbeda antar daerah, dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan indeks peserta didik (IPD) tiap wilayah kabupaten/kota

Rentang nilai satuan biaya per peserta didik per tahun:

Jenjang	Satuan Biaya (Rp)			Jumlah kab/kota yang...		Rata-rata kenaikan satuan biaya (%)
	Terendah		Tertinggi	Satuan biayanya tetap	Satuan biayanya naik	
SD	900.000	s.d	1.960.000	137	377	12,19
SMP	1.100.000	s.d	2.480.000	133	381	13,23
SMA	1.500.000	s.d	3.470.000	128	386	13,68
SMK	1.600.000	s.d	3.720.000	127	387	13,61
SLB	3.500.000	s.d	7.940.000	124	390	13,18

# 01 Contoh kenaikan nilai satuan biaya Bantuan Operasional Sekolah di Kab. Timur Tengah Selatan, NTT

		BOS 2020		BOS 2021
SD INPRES TANAH MERAH (50300562)	Satuan biaya	Rp900.000,-	↑ 5%	Rp940.000,-
	Besaran alokasi	Rp278.100.000,-		Rp290.940.000,-
SMP SWASTA KRISTEN 2 SOE (50300574)	Satuan biaya	Rp1.100.000,-	↑ 6%	Rp1.160.000,-
	Besaran alokasi	Rp250.800.000,-		Rp265.480.000,-
SMKN 2 SOE (50300590)	Satuan biaya	Rp1.600.000,-	↑ 6%	Rp1.690.000,-
	Besaran alokasi	Rp1.513.600.000,-		Rp1.598.740.000,-

Sumber:

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16/P/2021 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Masing-masing Daerah

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15/P/2021 tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler tahun Ajaran 2020/2021



# 01 Contoh kenaikan nilai satuan biaya Bantuan Operasional Sekolah di Kab. Kepulauan Aru, Maluku

		BOS 2020		BOS 2021
SD INPRES LONGGAR APARA (60101774)	Satuan biaya	Rp900.000,-	↑ 40%	Rp1.260.000,-
	Besaran alokasi	Rp181.800.000,-		Rp254.520.000,-
SMP NEGERI 2 DOBO (60101795)	Satuan biaya	Rp1.100.000,-	↑ 45%	Rp1.600.000,-
	Besaran alokasi	Rp667.700.000,-		Rp971.200.000,-
SMA 1 PULAU- PULAU ARU (60101801)	Satuan biaya	Rp1.500.000,-	↑ 49%	Rp2.230.000,-
	Besaran alokasi	Rp1.161.000.000,-		Rp1.726.020.000,-

Sumber:

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16/P/2021 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Masing-masing Daerah

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15/P/2021 tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler tahun Ajaran 2020/2021



# 01 Contoh kenaikan nilai satuan biaya Bantuan Operasional Sekolah di Kab. Intan Jaya, Papua

		BOS 2020		BOS 2021
SD YPPK SANEPA (60302416)	Satuan biaya	Rp900.000,-	↑ 117%	Rp1.960.000,-
	Besaran alokasi	Rp159.300.000,-		Rp346.920.000,-
SMP NEGERI 1 SUGAPA (60302436)	Satuan biaya	Rp1.100.000,-	↑ 125%	Rp2.480.000,-
	Besaran alokasi	Rp137.500.000,-		Rp310.000.000,-
SMA 1 SUGAPA (60302455)	Satuan biaya	Rp1.500.000,-	↑ 131%	Rp3.470.000,-
	Besaran alokasi	Rp93.000.000,-		Rp215.140.000,-

Sumber:

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16/P/2021 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Masing-masing Daerah

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15/P/2021 tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler tahun Ajaran 2020/2021



## 02 Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah tetap fleksibel sesuai kebutuhan sekolah, termasuk untuk melengkapi daftar periksa pembelajaran tatap muka dan untuk mendukung Asesmen Nasional

### Ketentuan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk pembayaran honor

- Pembayaran honor **tidak dibatasi alokasi maksimal** dalam kondisi **darurat bencana** yang ditetapkan oleh **Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah**
- Pembayaran honor **maksimal 50%** untuk sekolah negeri dan swasta dalam **kondisi normal**
- Honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan apabila dana masih tersedia

### Daftar periksa pembelajaran tatap muka

- 1 Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan
  - Toilet bersih dan layak
  - Sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer
- 2 Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan
- 3 Kesiapan menerapkan wajib masker
- 4 Memiliki *thermogun*
- 5 Memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang:
  - Memiliki comorbid tidak terkontrol
  - Tidak memiliki akses transportasi yang aman
  - Memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko COVID-19 yang tinggi atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri
- 6 Mendapatkan persetujuan komite sekolah/ perwakilan orang tua/wali

### Contoh dukungan untuk Asesmen Nasional

- 1 Pembiayaan honor, transportasi dan konsumsi proktor, teknisi dan pengawas
- 2 Pembiayaan pelaksanaan AN seperti penguatan internet dan jaringan

Pemerintah daerah perlu mendukung satuan pendidikan untuk memperbaiki RKAS

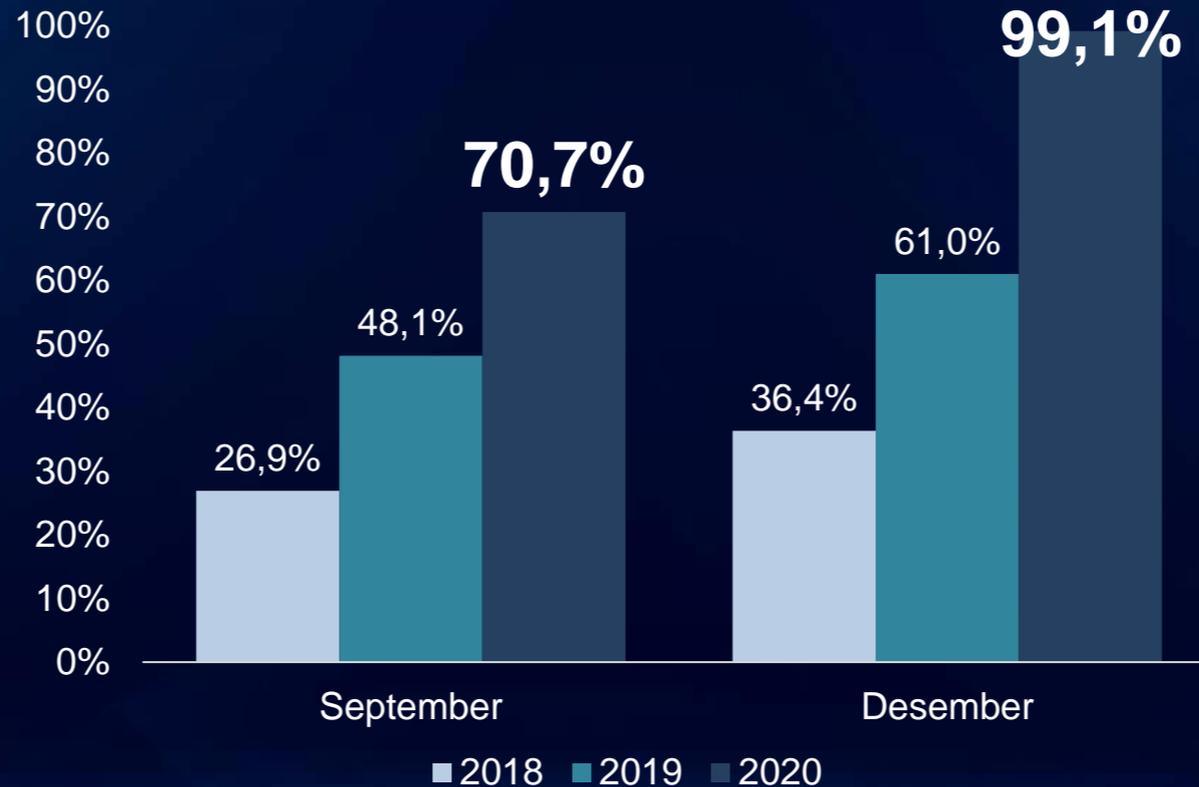


### 03 Pada tahun 2020, kebijakan mewajibkan pelaporan penggunaan BOS sebagai persyaratan penyaluran berhasil mempercepat dan meningkatkan tingkat pelaporan

Pada bulan September 2020,

# 70%

sekolah sudah melaporkan penggunaan BOS tahap I (dibandingkan dengan **48%** di bulan September 2019)



Pada bulan Desember 2020,

# 99%

sekolah sudah melaporkan penggunaan BOS tahap I (dibandingkan dengan **61%** di bulan September 2019)

# 03 Pelaporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah tetap dilakukan secara daring dan menjadi syarat penyaluran

## Mekanisme pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah

**Penyampaian pelaporan** penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah dilakukan secara daring melalui laman <https://bos.kemdikbud.go.id> dan menjadi **syarat penyaluran** untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah

## Pelaporan sebagai syarat penyaluran

**Penyaluran tahap I** dilakukan setelah sekolah menyampaikan **laporan** penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah **tahap II tahun sebelumnya**

**Penyaluran tahap II** dilakukan setelah sekolah menyampaikan **laporan** penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah **tahap III tahun sebelumnya**

**Penyaluran tahap III** dilakukan sekolah menyampaikan penyampaian **laporan tahap I tahun anggaran berjalan**

# DAFTAR ISI

**01**

**Kebijakan  
Bantuan Operasional Sekolah 2021**

---

**02**

**Kebijakan  
Dana Alokasi Khusus Fisik 2021**

**Pada tahun 2021, Pemerintah menyediakan DAK Fisik untuk 31.695 satuan pendidikan dengan alokasi sebesar Rp17,7T**

<b>Subbidang</b>	<b>Sasaran Satuan pendidikan</b>	<b>Alokasi</b>
PAUD	1.942	Rp 398.343.537.000
SD	21.464	Rp 7.005.996.737.000
SMP	5.234	Rp 657.844.711.000
SKB	150	Rp 110.152.342.000
SMA	1.263	Rp 2.436.845.368.000
SLB	360	Rp 125.379.588.000
SMK	1.282	Rp 3.050.037.717.000
<b>TOTAL</b>	<b>31.695</b>	<b>Rp 17.784.600.000.000</b>

# Pokok-Pokok Kebijakan Dana Alokasi Fisik Tahun 2021

01



## Ketuntasan Sarana dan Prasarana Pendidikan

*Pemenuhan dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan sarana prasarana sekolah secara keseluruhan (“whole school approach”)*

02



## Pelaksanaan Bersifat Kontraktual

*Kepala sekolah fokus pada proses pembelajaran dan tidak pada kegiatan rehabilitasi dan pembangunan prasarana*

03



## Pelibatan Dinas PUPR

*Dinas PUPR melakukan asesmen kerusakan bangunan untuk meningkatkan validitas data sarana prasarana sekolah*

# 01 Kebijakan ketuntasan sarana dan prasarana pendidikan



# 01 Menu Dana Alokasi Fisik 2021 untuk ketuntasan sarana prasarana sekolah

*sesuai Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan*



## Rehabilitasi dan Pembangunan Prasarana

Rincian menu ini meliputi rehab dan pembangunan ruang kelas, perpustakaan, ruang guru, toilet, laboratorium, RPS/ruang praktik, UKS, R. Ketrampilan, rumah dinas guru, ruang ibadah, dan ruang pembelajaran inklusi

## Penyediaan Sarana Pendidikan

Rincian menu ini meliputi pengadaan alat laboratorium dan peralatan praktik utama dan pengadaan media pembelajaran (termasuk APE) dan alat TIK

## 02 Pengadaan secara kontraktual agar sekolah fokus pada proses pembelajaran dan tidak terbebani urusan administrasi pengadaan barang/jasa

Kategori	Swakelola	Kontraktual
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilaksanakan oleh sekolah</li> <li>• Manajemen sepenuhnya di sekolah (menambah pekerjaan PTK)</li> <li>• Keterbatasan peralatan yang dimiliki oleh sekolah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilaksanakan oleh dinas pendidikan dengan penyedia</li> <li>• Manajemen terpusat di dinas pendidikan agar sekolah tidak terbebani urusan administrasi pengadaan barang/jasa</li> <li>• Peralatan disediakan oleh penyedia, dan jika dalam pelaksanaan dibutuhkan peralatan khusus kontraktor bisa mendatangkan dari daerah lain</li> </ul>
Waktu	Waktu pelaksanaan yang relatif lama tergantung pada kinerja sekolah	Adanya jaminan ketepatan penyelesaian pembangunan dari pihak penyedia
Hasil	Kualitas bangunan antar sekolah bervariasi	Kualitas bangunan antar sekolah seragam antara sekolah dalam satu wilayah

# 03 Pelibatan Dinas PUPR untuk meningkatkan validitas data sarana prasarana sekolah

## Kategori

### Dana Alokasi Fisik Tahun 2020

### Dana Alokasi Fisik Tahun 2021

#### Penilaian kerusakan

Penilaian kerusakan dilakukan secara **mandiri oleh sekolah** tanpa di dukung oleh tenaga ahli

Penilaian kerusakan dilakukan oleh **dinas PUPR** yang memiliki instrumen dan **tenaga profesional**

#### Validitas data

Validitas data kerusakan bangunan **kurang** menggambarkan **kondisi sesungguhnya**

Validitas data bangunan sesuai **kondisi sesungguhnya**

#### Efisiensi biaya

Tingkat **efisiensi rendah** karena **banyak kesalahan** pada data perencanaan

Tingkat **efisiensi meningkat** karena pelibatan PUPR dalam asesmen kerusakan bangunan

## KESIMPULAN

01

### Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah 2021

Pada tahun 2021, Pemerintah menyediakan BOS kepada 216.662 satuan pendidikan dengan alokasi sebesar Rp52,5T

01



Nilai satuan biaya  
Bantuan Operasional Sekolah  
bervariasi sesuai  
karakteristik daerah

02



Penggunaan dana  
Bantuan Operasional Sekolah  
tetap fleksibel, termasuk  
untuk keperluan persiapan  
pembelajaran tatap muka

03



Pelaporan penggunaan  
Bantuan Operasional Sekolah  
dilakukan secara daring

## KESIMPULAN

02

### Kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik 2021

Pada tahun 2021, Pemerintah menyediakan DAK Fisik untuk 31.695 satuan pendidikan dengan alokasi sebesar Rp17,7T

01



#### Ketuntasan Sarana dan Prasarana Pendidikan

*Pemenuhan dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan sarana prasarana sekolah*

02



#### Pelaksanaan Bersifat Kontraktual

*Kepala sekolah fokus pada proses pembelajaran dan tidak pada kegiatan rehabilitasi dan pembangunan prasarana*

03



#### Pelibatan Dinas PUPR

*Dinas PUPR melakukan asesmen kerusakan bangunan untuk meningkatkan validitas data sarana prasarana sekolah*

# TERIMA KASIH



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN